

DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xvii
BAB 1 Konsep Ekonomi Publik	1
1.1 Pengertian Ekonomi Publik	1
1.2 Arti dan Komponen Sektor Publik	3
1.3 Lingkup dan Proses Kegiatan Ekonomi Publik	7
BAB 2 Kegagalan Pasar dan Peranan Pemerintah dalam Perekonomian	11
2.1 Kegagalan Pasar	12
2.2 Peranan Pemerintah dalam Perekonomian	24
2.3 Peranan Pemerintah dalam Perdagangan Internasional	35
2.4 Penyebab Gagalnya Peran Pemerintah dalam Perekonomian	37

BAB 3	Barang dan Jasa Publik	39
3.1	Pengertian Barang dan Jasa Publik serta Barang dan Jasa Privat	39
3.2	Penentuan Jumlah Persediaan dan Harga Barang Publik dan Privat	43
3.3	Pelayanan Publik	44
3.3.1	Harga Pelayanan/Jasa Publik	45
3.3.2	Dasar Penentuan Harga Pelayanan Publik	48
3.3.3	Metode Penentuan Harga Pelayanan Publik	49
3.3.4	Biaya dan Manfaat Sosial Barang Publik	52
BAB 4	Kebijakan Fiskal	55
4.1	Sejarah Kebijakan Fiskal	55
4.2	Lingkup dan Pengertian Kebijakan Fiskal	57
4.3	Tahapan dan Analisis Kebijakan Fiskal	57
4.4	Tujuan Kebijakan Fiskal	60
4.5	Jenis Kebijakan Fiskal	70
BAB 5	Keuangan Negara dan Keuangan Daerah Era Otonomi Daerah	73
5.1	Keuangan Negara	74
5.1.1	Arti, Tujuan, dan Fungsi APBN	74
5.1.2	Prinsip, Asas, Landasan Hukum dan Cara Penyusunan APBN	75
5.1.3	Kebijakan APBN	79
5.1.4	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara	81
5.1.5	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara	83

5.2	Keuangan Daerah	83
5.2.1	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	86
5.2.2	Asas Umum dan Struktur APBD	88
5.2.3	Tahap-Tahap Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Penentuan Strategi dan Prioritas APBD	96
BAB 6	Penerimaan Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Daerah)	99
6.1	Penerimaan Pemerintah	99
6.1.1	Penerimaan Pemerintah Pusat	101
6.1.2	Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	102
6.2	Analisis Potensi Penerimaan/Pendapatan Daerah	103
6.2.1	Pemetaan Potensi Pendapatan dengan Analisis Tipologi Klassen	106
6.2.2	Penghitungan Potensi Pendapatan Basis Mikro	116
BAB 7	Penerimaan Pemerintah: Pajak dan Retribusi Daerah	123
7.1	Sejarah Perkembangan Pajak	124
7.2	Pengertian dan Prinsip Pengenaan Pajak	124
7.3	Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung	131
7.4	Tarif Pajak	134
7.5	Pengaruh Pengenaan Pajak Terhadap Perilaku Ekonomi	136
7.6	Faktor Penentu Penerimaan Perpajakan	137
7.7	Kebijakan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	138
7.8	Tolok Ukur Kinerja Penerimaan Perpajakan Suatu Negara	141
7.9	Pajak Daerah	143

7.9.1	Jenis Pajak Daerah	144
7.9.2	Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah	147
7.9.3	Bagi Hasil Pajak Daerah	149
7.10	Retribusi Daerah	149
BAB 8	Penerimaan Pembiayaan: Pinjaman/Obligasi Negara dan Daerah	155
8.1	Pinjaman Negara	156
8.2	Pinjaman Negara	164
8.3	Surat Berharga (Surat Utang Negara/SUN)	170
8.3.1	Strategi Pembiayaan SUN	172
8.3.2	Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN)	172
8.3.3	Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	174
8.4	Pinjaman Daerah	175
8.4.1	Prinsip Umum Pinjaman Daerah	176
8.5	Obligasi Daerah	180
8.5.1	Kegiatan yang Dapat Dibiayai Obligasi Daerah	183
8.5.2	Prosedur Penerbitan Obligasi Daerah	184
8.5.3	Dasar Hukum tentang Penerbitan Obligasi Daerah	184
8.5.4	Pelaporan, Evaluasi, Publikasi Informasi dan Sanksi	186
8.5.5	Prospek dan Kendala Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah	186
8.6	Obligasi Syariah (Sukuk)	189
Bab 9	Penerimaan Desa: Dana Desa (DD)	193
9.1	Desa dan Dana Desa	193
9.2	Regulasi Penentuan Jumlah Dana Desa	194

9.3	Penggunaan Dana Desa	195
9.4	Keuangan Desa dan Struktur APBDesa	197
BAB 10	Pengeluaran Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)	203
10.1	Dasar Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	204
10.2	Prinsip-Prinsip Pokok Pengeluaran Pemerintah	210
10.3	Penyebab Peningkatan Pengeluaran Pemerintah	213
10.4	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perekonomian	217
10.5	Pengeluaran/Belanja Negara	218
10.6	Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah	223
10.7	Manajemen Belanja Daerah	225
BAB 11	Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	229
11.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	230
11.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	232
11.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	237
BAB 12	Pengeluaran Pemerintah: Investasi Sektor Publik	247
12.1	Belanja Modal Sebagai Investasi	248
12.2	Kategori Investasi Sektor Publik	252
12.3	Kategori Akuntansi Belanja Modal	256
12.4	Kemitraan Pemerintah Daerah	259
12.5	Pertimbangan dan Risiko Investasi Publik	264

12.6	Kebijakan Lelang Terbuka (<i>Competitive Bids</i>)	265
12.6.1	Sistem Penawaran Harga dalam Lelang Terbuka	266
12.6.2	Manfaat Tender yang Kompetitif dan Terbuka	268
12.7	Investasi Publik, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat	269
BAB 13	Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Sektor Publik dan Kinerja Ekonomi Publik	273
13.1	Kinerja Keuangan Daerah	274
13.2	Kinerja Sektor Publik	278
13.2.1	Permasalahan Pengukuran Kinerja Sektor Publik	280
13.2.2	Pengertian Anggaran dan Sistem Penganggaran	281
13.2.3	Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah	289
13.2.4	Hubungan Antara Pengukuran Kinerja dan Sistem Anggaran	289
13.3	Kinerja Ekonomi Publik	292
13.3.1	Teori Kesejahteraan	292
13.3.2	Indikator Kesejahteraan	296
13.3.3	Konsep dan Pengukuran Komponen IPM	300
13.3.4	Manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	305
	Daftar Pustaka	309
	Glosarium	315
	Biodata Penulis	343